

**STRATEGI REKRUTMEN
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA YOGYAKARTA:
*Kader, Pengurus Partai, dan Pejabat Publik***

AHMAD ANFASUL MAROM

Dosen Politik Islam Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
anafasul@yahoo.com

Abstract

Nowadays, recruitment becomes a serious problem for political party reform in Indonesia. We have witnessed many instant cadres who lacked competence but easily obtained a position. Apparently, this issue has become a trend among parties causing the party function to change into broker such as Out Sourcing Company. Before the cadres were engaged in political activities, they were already known in the public space such as celebrities, rich men, and elite families. By this context, we need to pay attention toward this phenomenon because from this point the policy makers are made. This paper will highlight the recruitment process of Prosperous and Justice Party (PKS) in Yogyakarta. The time setting is after 2009 Election. There are two research questions that will be discussed here: First, what kind of strategies do PKS use in recruiting their cadres? Second, how do they select their cadre to be placed in strategic positions (party, executive, legislative)? Furthermore, this paper will adopt some theories of recruitment to examine the PKS's political party typology.

Keywords: *Islamic party, Prosperous and Justice Party (PKS), Yogyakarta*

Abstrak

Belakangan ini, isu rekrutmen menjadi masalah serius bagi perbaikan institusionalisasi partai politik di Indonesia. Sebagaimana yang kita lihat begitu banyak kader instan yang tiba-tiba menduduki jabatan publik tanpa melalui proses kaderisasi yang jelas. Kondisi kepartaian semacam ini tampaknya sudah bukan barang langka lagi di negeri ini, bahkan telah menjadi trend di kalangan partai-partai. Fungsi partai yang semestinya membawa agregasi kepentingan konstituen seakan-akan berubah menjadi agen penyalur pekerjaan semacam perusahaan out sourcing. Sebelum para kader instan itu terlibat dalam kegiatan politik biasanya mereka telah populer terlebih dahulu di mata publik

sepert artis, saudagar kaya, dan anak-anaknya tokoh elit politik. Di sinilah saya kira perlu member perhatian serius terhadap isu rekrutmen. Karena dari sinilah seharusnya awal mula para pejabat public itu berasal. Paper ini akan meneliti proses rekrutmen yang berlaku di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yogyakarta. Untuk setting waktunya dibatasi pada masa pasca Pemilu 2009. Ada dua masalah dasar yang diangkat di sini: 1) Strategi apa sajakah yang PKS gunakan dalam merekrut kader-kadernya? 2) Bagaimana mereka menentukan kader-kader terbaiknya yang berhak menduduki jabatan-jabatan strategis? Selanjutnya, di sini juga akan meminjam teori-teori rekrutmen untuk memetakan tipologi kepartaian PKS dewasa ini.

Kata Kunci: partai Islam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yogyakarta

Pendahuluan

Persoalan rekrutmen menjadi hal yang sangat penting dalam konteks perbaikan partai politik di Indonesia. Sejak meletupnya Reformasi 1998, banyak sekali partai politik bermunculan. Menurut data KPU kurang lebih ada 200 partai baru pada Pemilu 1999 dan hanya 48 partai yang dinyatakan berhak mengikuti pemilu, Pemilu 2004 terdapat 24 parpol, dan pada Pemilu 2009 jumlah mereka bertambah lagi yaitu 34 partai.

Tingginya jumlah kontestan setiap menjelang pemilu itu melahirkan dua pendapat. Ada yang memandangnya sebagai suatu kewajaran setelah kurang lebih tiga dekade kebebasan masyarakat dikekang dan parpol 'dibonsai' oleh Orde Baru. Sementara ada yang meragukannya sebab sistem pemerintah yang stabil akan sulit terbangun apabila jumlah kontestan partai terlalu banyak. Terlebih lagi, tidak semua partai itu didirikan secara serius untuk mengagregasikan kepentingan banyak orang. Beberapa didirikan hanya untuk memenuhi ambisi politik sekelompok kecil orang saja.¹ Kekurangseriusan sejumlah partai itu dapat dilihat dari kurang sensitifnya parpol dalam merespon isu-isu publik, miskinnya kegiatan kepartaian, dan banyaknya anggota dewan (kader parpol) yang terlibat korupsi.

Buruknya kinerja parpol itu diperkuat dengan temuan survei LSI (Lembaga Survei Indonesia), April 2004-Maret 2006, yang menempatkan partai politik pada ranking paling bawah setelah lembaga publik lainnya seperti kepolisian, militer, dan birokrasi

pemerintahan. Selanjutnya, prestasi partai politik di mata publik sejak Pemilu 2009 pun tidak semakin membaik. Baru-baru ini kita digegerkan kembali oleh berita-berita 'miring' terkait dengan kader-kader partai politik baik yang duduk di anggota dewan maupun di kepartaian. Mulai dari pembangunan gedung baru DPR RI, kenaikan gaji dan dana aspirasi, dan penghamburan dana rakyat dengan modus studi banding ke luar negeri.

Dalam konteks inilah pola rekrutmen (hulu-hilir) perlu kita perhatikan secara serius sebab ia merupakan awal pintu masuknya para kader sebelum mereka memperoleh jabatan-jabatan strategis. Bukan rahasia lagi bahwa selama ini kita sering menemukan kader-kader '*outsourcing*' alias kader instan yang tidak mengakar sama sekali di masyarakat. Biasanya kader-kader instan ini telah populer terlebih dahulu sebelum mereka terlibat dalam kegiatan partai politik seperti artis, saudagar kaya, anak-anaknya tokoh yang menumpang nama besar orang tuanya.

Penelitian ini akan menganalisa proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik di tubuh PKS. Ada dua masalah inti yang diangkat di sini. 1) Langkah apa sajakah yang ditempuh oleh PKS dalam melakukan rekrutmen anggotanya? 2) dan bagaimana mereka menentukan kader-kadernya dalam penempatan jabatan-jabatan publik? Unit analisis penelitian ini adalah Partai Keadilan Sejahtera. Lokus dan setting waktunya bertempat di Yogyakarta dengan masa pasca Pemilu 2009.

Teori-Teori Rekrutmen

Rekrutmen politik merupakan proses di mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang-orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi massa yang melibatkan golongan tertentu seperti buruh, petani, pemuda, perempuan dan lain-lain. Caranya melalui kontak pribadi, diskusi, dan sebagainya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pendekatan partai politik ini secara tidak langsung memperluas partisipasi politik. Adanya rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas kaderisasi partai politik yang lebih baik karena tujuannya untuk merekrut kader baru yang pada masa mendatang dipersiapkan untuk menggantikan pemimpin politik lama sebagai proses seleksi kepemimpinan.

Sebagaimana yang dikatakan Mochtar Masoed bahwa rekrutmen politik merupakan penyeleksian rakyat untuk kegiatan

politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan sebagainya. Rekrutmen politik ini dimulai pada saat anggota masyarakat telah menerima sosialisasi politik yang memadai, sehingga mampu memainkan peranan politiknya dalam sebuah sistem politik. Dengan proses rekrutmen yang baik diharapkan menghasilkan politisi dan pejabat publik yang baik pula, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkannya. Memang proses rekrutmen tidak terjadi begitu saja, menurut I Ketut Putra Erawan setidaknya ada beberapa tahapan yang perlu ditempuh antara lain:

- a. Penjaringan bakal calon; partai politik melakukan penjaringan bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Apakah prosesnya dilakukan secara terbuka atau tertutup dan apakah itu dilakukan oleh individu tertentu atau oleh tim khusus. Semuanya itu harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau mekanisme internal partai politik bersangkutan.
- b. Sosialisasi dan penilaian feasibilitas bakal calon; partai politik melakukan penilaian kepada para bakal calon yang meliputi persyaratan umum (pendidikan dan usia), dan persyaratan lain (kemampuan keuangan, komitmen dengan garis perjuangan partai) dan sebagainya. Partai politik perlu mengetahui kelebihan/kekuatan dan kekurangan/kelemahan masing-masing bakal calon agar diperoleh calon unggulan yang harus segera disosialisasikan untuk mendapat dukungan internal partai.
- c. Penentuan calon; partai politik atau gabungan partai politik melakukan pemilihan untuk memperoleh dan menetapkan pasangan calon di antara bakal calon yang ada dengan dilandasi peraturan perundang-undangan atau aturan yang berlaku di internal partai/aturan main yang ditetapkan oleh gabungan partai dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti, pendidikan, pengalaman, kemampuan, loyalitas, senioritas, kekayaan, ketokohan, popularitas, etnisitas, dan seterusnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, Barbara Geddes mengemukakan preferensi rekrutmen yang baik bagi partai politik, yaitu:²

a. Compartmentalization.

Pola ini menekankan kriteria rekrutmen berdasarkan gabungan antara sisi loyalitas calon kepada partai politik, kompetensi, keahlian, pendidikan, ketokohan, pengalaman, dan popularitasnya, sehingga dapat berdampak pada perolehan sukungan suara dalam pemilihan umum. Sebagai gabungan dari berbagai kriteria rekrutmen yang ada, pola ini berusaha memperoleh dukungan massa/kelompok sosial sebanyak-banyaknya.

b. Partisan

Pola ini menekankan kriteria rekrutmen berdasarkan kepada aspek *trust* (kepercayaan), kesetiaan, prestasi, dan senioritas seseorang di sebuah partai politik. Dengan demikian mereka yang direkrut untuk menduduki jabatan politik atau jabatan publik biasanya adalah kader atau loyalis partai politik itu sendiri.

c. Reform (merit)

Pola ini menekankan kriteria rekrutmen berdasarkan kepada aspek merit, profesionalisme kemampuan juga mempertimbangkan aspek pengalaman dan tingkat pendidikan seseorang. Standar ini perlu dilakukan mengingat bahwa mereka yang direkrut nantinya harus benar-benar seseorang yang berkualitas, cakap dan diyakini mampu melaksanakan tugasnya.

d. Survival

Pola ini menekankan pada kalkulasi perhitungan yang diyakini bisa menguntungkan masa depan partai. Calon yang akan direkrut bisa berasal dari luar unsur atau kader partai atau simpatisan partai, yang penting kalkulasinya dapat menguntungkan partai dan membuat partai tetap bisa *survive*. Pertimbangan terhadap ketokohan, popularitas, dan kekayaan dari calon sangat menentukan dalam pola rekrutmen ini.

Sementara terkait dengan tipologi partai politik, Maurice Duverger membaginya menjadi dua tipe, baik itu berdasarkan struktur organisasi maupun tujuan dan ideologi partainya.³ Pertama, partai elit yang terbagi dalam dua tipe, yakni konservatif dan liberal. Keanggotaan partai kader yang konservatif terdiri dari kaum aristokrat, industrialis besar, bankir dan agamawan. Sedangkan yang liberal terdiri dari kaum pedagang, industrialis menengah, pegawai pemerintah, pengacara, wartawan, dan penulis.

Partai jenis ini tidak bertujuan memperoleh anggota sebanyak mungkin tetapi lebih menekankan pada dukungan orang-orang terkemuka. Lebih memperhatikan kualitas dari pada kuantitas. Warga negara yang terkemuka yang dicari karena prestise mereka akan memberi pengaruh moral tertentu. Barangkali karena kekayaan orang-orang tersebut akan memungkinkan partai-partai tersebut mendapat bantuan untuk biaya-biaya kampanye.⁴

Kedua, partai massa yang memiliki ciri-ciri rekrutmen anggota tampak sebagai kegiatan yang fundamental. Dari sudut politik, kualitas anggota merupakan hal yang terpenting dalam proses pendidikan rakyat. Semakin banyak jumlah anggota partai, semakin banyak orang yang bisa mempengaruhi melalui pendidikan politik tersebut. Dukungan keuangan partai diperoleh dari massa anggota bukan dari kalangan elit. Partai ini mengambil alih peran pendanaan oleh kaum kapitalis dalam kegiatan pemilihan sehingga tercipta pada pendanaan keuangan yang demokratis.

Sedangkan menurut Martin Lipset dan S. Rokan, partai politik muncul karena adanya pembilahan sosial dan pengelompokan yang memiliki identitas sendiri yang mengarah pada afiliasi politik yang sama. Partai massa dibentuk dari bawah dalam menyampaikan afiliasi masyarakat dalam proses politik.⁵ Partai massa bukan lagi dibentuk atas keinginan para bangsawan, melainkan muncul dari luar parlemen ketika kekuasaan para bangsawan atau raja mulai dikecam dan mulai dibatasi. Timbul keinginan masyarakat bawah untuk melibatkan diri dalam proses politik sebagai sesuatu yang sangat mendesak. Di samping itu, partai massa memiliki aturan yang kuat, memiliki anggota yang relatif formal dan tersentralisasi, disiplin, dan sangat oligarkis.

Dalam pandangan Riswandha Imawan tipologi partai kader dan partai massa tergantung pada sudut komposisinya. Partai kader adalah partai politik yang lebih mementingkan kualitas dan disiplin organisasi yang tinggi. Situasi masyarakat bisa dilihat dari tingkat pendidikannya yang tinggi, budaya partisan, pemimpin rasional dan berorientasi pada pemecahan masalah yang dihadapi. Partai semacam ini bersifat eksklusif, platform partai sangat jelas, dan nasib partai bergantung pada struktur dan mekanisme. Sedangkan partai massa lebih mementingkan kuantitas dan mobilisasi dalam jumlah besar. Situasi masyarakat dengan pendidikan rendah, budaya politik parokial, dan kepemimpinan kharismatik. Model partai semacam ini bersifat inklusif, platform partai tidak jelas dan nasib partai bergantung pada pemimpin.

Model tipologi partai lainnya adalah "*catch all party*." Model ini pertama kali disampaikan oleh Otto Krickheimer dengan beberapa alasan antara lain, pertama, munculnya ketidakpuasan terhadap dikotomi partai elit dan partai massa. Kedua, adanya pengaruh pemikiran Anthony Downs yang mengatakan bahwa pemilih cenderung rasional. Ketiga, pengaruh pemikiran berakhirnya ideologi-ideologi partai.⁶

Catch all party adalah pembentukan partai politik tanpa pandang bulu di mana partai politik tetap mempertahankan pengikut aslinya dari kelas awal yang dibentuk, dan merangkul pengikut lainnya. Format *catch all party* mengagungkan pragmatisme dan rasionalitas. Integrasi yang potensial bagi *catch all party* adalah terletak pada kombinasi sejumlah faktor yang hasil akhirnya merupakan perolehan suara sebanyak mungkin pada saat pemilihan. Oleh karena itu, format ini harus masuk ke dalam fikiran orang-orang sebagai benda politik. Ibarat barang konsumen dengan merk terkenal dengan kualitas terbaik.⁷

Akar Sejarah Partai

Sebelum mengalaborasi sistem rekrutmen PKS, sebagai prolog perlu kami jelaskan sejarah dan ideologi terbentuknya Partai Keadilan Sejahtera, karena dari sinilah kita bisa melihat karakter, filosofi, strategi politik dan transformasi PKS dewasa ini.

Jatuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998 melahirkan era baru di negeri ini, yaitu Era Reformasi. Eforia politik pada waktu itu memberi energi yang luar biasa bagi *interest groups*, khususnya partai politik. Selama Orde Baru partai politik hanya dibatasi tiga partai politik namun sejak liberalisasi politik di Era Reformasi partai politik bermunculan bak jamur di masa hujan.

Angin reformasi telah membuka iklim politik yang tadinya sentralistik dan militeristik berubah menuju demokratik. Jangankan berani mendirikan partai politik, baru punya keinginan saja untuk merumuskan cita-cita politik bisa dituduh melakukan kegiatan subversif, makar, dan seterusnya. Oleh karena itu, tidak heran kalau kemudian jarang sekali kita menemui ekspresi politik masyarakat di ruang publik karena mereka selalu ditekan, diancam, bahkan diteror terus menerus oleh negara.

Selanjutnya, fenomena munculnya partai yang menggunakan bendera Islam juga memantik kelompok masyarakat muslim. Setidaknya ada 25 partai politik yang secara eksplisit maupun implisit memperlihatkan identitas keislamannya. Tampaknya sebagian besar

partai-partai tersebut memiliki akar idiologis yang kuat dengan kontestan partai pada pemilu yang diselenggarakan pertama kali di Indonesia, 1955.⁸ Sebagai contoh Partai Bulan Bintang (PBB) yang dikatakan sebagai wujud transformasi partai Masyumi yang pernah menjadi partai besar pada pemilu 1955, juga lahir partai Islam berbasis massa Islam dengan mudah mentransformasikan dirinya menjadi partai politik, seperti PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang berasal dari NU (Nahdhatul Ulama), maupun PAN (Partai Amanat Nasional) yang mewarisi tradisi Muhammadiyah.

Di samping itu, lahir PK (Partai Keadilan) yang mengundang banyak perhatian masyarakat dari kalangan menengah dan mahasiswa, partai ini lahir dengan basis Islam sangat kuat. PK (Partai Keadilan) dideklarasikan tanggal 9 Agustus 1998 di masjid al-Azhar kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan puluhan ribu massanya. Kehadiran PK merupakan fenomena menarik untuk dikaji karena partai ini lahir bukan dari warisan komunitas politik yang pernah eksis sebelumnya.⁹

Awalnya, kader PK tergabung dalam dua kutub LSM. Yakni para lulusan Timur Tengah yang tergabung dalam lembaga Pesantren al-Haramain, dan kader-kader lulusan Barat yang aktif dalam kegiatan keislaman ISTECS (*Institute for Science and Technology Studies*). Generasi ini kemudian bergabung dalam melakukan kajian Islam bersama, kepedulian sosial yang sama, pembelajaran publik bersama, dan kemudian memiliki pemikiran mengenai apa yang harus dilakukan di Era Reformasi. Pada akhirnya komunitas tersebut memunculkan *polling* yang menghasilkan keputusan untuk mendirikan partai politik.¹⁰

Pada mulanya kelahiran partai PK menimbulkan pro-kontra di kalangan internal mereka. Sebagian mengatakan perlu untuk mendirikan partai politik, sementara sebagian yang lain menyatakan tidak. Persoalan ini kemudian menjadi pembahasan yang cukup panjang. Sebagian berpendapat bahwa Era Reformasi merupakan peluang yang baik untuk meningkatkan tahap perjuangan pada *mihwar siyāsi*. Akan tetapi, sebagian menyatakan bahwa capaian yang diraih belum cukup untuk mewujudkan partai politik.¹¹

Karena pro-dan kontra terus berlangsung forum musyawarah pun diperbesar dengan melakukan survei, jajak pendapat melalui *polling*. Survei yang dilakukan kepada aktivis gerakan dakwah kampus di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Ada dua pertanyaan yang diajukan dalam jajak pendapat itu adalah bentuk apa yang akan ditampilkan untuk muncul di tengah publik pada Era reformasi ini, apakah berbentuk organisasi massa (Ormas), organisasi politik

(Orpol), atau tetap mempertahankan bentuk penampilan yang selama ini digunakan, yaitu dalam bentuk yayasan dan lembaga-lembaga.

Enam ribu kuesioner disebar, sebanyak 5800 buah kuesioner kembali. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa 68 persen responden menginginkan untuk mendirikan partai politik, hanya 27 persen responden yang berkeinginan membentuk ormas. Sementara itu sisanya berkeinginan untuk mempertahankan apa yang sudah ada dan kembali ke yayasan, LSM, pesantren, kampus, dan berbagai lembaga yang selama ini mereka geluti.¹²

Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut berkumpullah 52 orang dengan beragam latar belakang pendidikan, suku bangsa, profesi dan lain sebagainya. Semuanya mewakili dari berbagai kalangan yang termasuk dalam jaringan aktivis dakwah kampus. Ada juga tokoh-tokoh yang diundang dalam kapasitasnya sebagai pribadi, dengan beragam pertimbangan. Hampir bisa dipastikan bahwa seluruh tokoh tersebut adalah mereka yang terbiasa mengisi berbagai acara keagamaan dalam aktivitas yang diselenggarakan di berbagai kampus.¹³

Lima puluh dua orang itulah yang kemudian merumuskan dan mendirikan partai politik yang diberi nama Partai Keadilan (PK), dengan memilih Dr. Hidayat Nurwahid, M.A. sebagai Ketua Dewan Pendiri dan Lutfi Hasan Ishaaq, M.A. sebagai Sekretaris Dewan Pendiri. Selanjutnya, PK melakukan musyawarah partai dan mengangkat Dr. Nur Mahmudi Ismail sebagai Presiden Partai dan Dr. Salim Segaf Al-Jufri sebagai Ketua Dewan Syura partai. Sedangkan Sekretaris Jenderal dipercayakan kepada Anis Matta, Lc.

Melihat proses pendirian sampai dengan deklarasi partai ini, dapat disimpulkan bahwa gerakan ini sejak awal memiliki kekuatan utama pada pengorganisasian kader bukan pada kekuatan kharismatik seorang maupun kelompok orang. Dapat dilihat ketika pendirian partai tersebut dilakukan secara kolektif (jamaah) di mana seluruh komponen jaringan pergerakan dengan 52 tokoh-tokohnya. Pembentukan partai ini juga memperlihatkan karakter partai modern yang biasanya didirikan secara kolektif dan sebagai respon dari perubahan sosial yang terjadi.¹⁴

PK lebih memprioritaskan pelayanan kepada publik dari semua bidang, diawali dari masalah kualitas spiritual, kualitas material, dalam bidang kehidupan sosial, kependidikan, kebudayaan dan masalah ekonomi politik. Untuk mengukuhkan dan melengkapi stuktur kepengurusan partai maka PK melakukan berbagai upaya pembangunan dalam tubuh partai yaitu membangun struktur dari

Dewan Pengurus Wilayah (DPP) di tingkat nasional, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) di tingkatan propinsi, Dewan Pengurus Daerah di tingkat kabupaten atau kota, Dewan Pengurus Cabang (DPC) di tingkat kecamatan, dan Dewan Pengurus Ranting (DPRa) di tingkat desa atau kelurahan.

Adapun modal awal dan sekaligus tulang punggung terbangunnya struktur dari pusat hingga daerah adalah para kader tarbiyah. Mereka yang mengisi kepengurusan dan menjadi kader-kader PK yang handal. Pada masa-masa awal didirikannya PK, kader tarbiyah mencapai 42.202 orang, dan kader pendukung sebanyak 39.831. Kader inti terdiri dari 120 Anggota Ahli dan 2.251 Anggota Dewasa, dengan komposisi jenis kelamin 2.049 laki-laki dan 322 perempuan.¹⁵ Pembentukan kepengurusan dan struktur partai yang relatif singkat tersebut dilakukan PK agar bisa mengikuti pemilu yang akan diadakan kali pertama setelah runtuhnya rezim Soeharto.

Transformasi dari PK Ke PKS

Pemilu 1999 adalah pertama kalinya PK mengikuti pesta demokrasi. Sebagai partai baru PK bisa dikatakan cukup berhasil dengan perolehan 1.436.5651 suara atau 1,36 persen dari keseluruhan jumlah suara dan mendapatkan tujuh kursi DPR Pusat. Untuk melaju ke pemilu selanjutnya PK harus berbenah dan memperkuat dirinya. Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada Pemilu 2004 (*electoral threshold*) dua persen. Jika PK ingin ikut serta dalam pemilu 2004 maka ada dua pilihan, yaitu bergabung dengan partai lain atau membuat partai politik baru. Oleh karena itu, para pengurusnya mulai berfikir membuat strategi baru untuk merumuskan masa depan partai ini.

Merasa keberatan dengan peraturan tentang *electoral threshold* maka PK mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi bersama dengan partai-partai lain yang tidak lolos. Akan tetapi, di tengah proses PK menarik diri dan membatalkan pengajuan *judicial review* tersebut.

Strategi lain yang dilakukan partai PK adalah melakukan lobi-lobi terhadap partai-partai Islam yang juga tidak lolos *electoral threshold* maupun yang lolos. Seperti partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan), dan PBB (Partai Bulan Bintang), akan tetapi strategi ini gagal karena partai-partai Islam yang lolos *electoral threshold* berkeinginan untuk mengurangi jumlah partai Islam. Setelah strategi pertama tidak berhasil maka pilihan terakhir yang harus dilakukan untuk bisa mengikuti pemilu 2004 yaitu dengan membuat partai baru,

maka dilaksanakanlah musyawarah bersama untuk merumuskan partai baru dengan membentuk tim kecil yang dipimpin oleh Muzammil Yusuf.

Dalam rapat tersebut disepakati untuk menambah kata “Sejahtera” sebagai nama partai baru tersebut dan menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tambahan ini dipilih dengan pertimbangan filosofis bahwa partai baru yang akan lahir tidak semata-mata menekankan pada perjuangan menegakkan keadilan dalam ranah hukum pada tingkat politik, tetapi juga menyelesaikan persoalan tentang belum tercapainya kesejahteraan di kalangan masyarakat bawah.¹⁶

Partai Keadilan Sejahtera didirikan pada tanggal 20 April 2002 bertepatan dengan 7 Safar 1423 H. Sebagaimana telah disebutkan di atas, partai ini didirikan sebagai bagian dari upaya strategis PK untuk menyiasati UU Pemilu yang baru, terutama dampak dari *electoral threshold*. Baik visi dan misi kedua partai tersebut tidak jauh berbeda. Perbedaan hanya terletak pada nama dan lambang partai. Itupun hanya pada tulisan “sejahtera” dan “untaian padi tegak lurus berada di antara bulan sabit”, selebihnya sama. Bahkan beberapa deklarator PKS adalah pendiri PK.¹⁷ Baik suprastruktur (ideologi, pemikiran dan konsep partai), maupun infrastruktur PKS (baik berupa jaringan kader, kepengurusan hingga aset-aset partai) pun tidak ada bedanya dengan PK.

Majelis Syura Partai Keadilan XIII, pada tanggal 17 April 2003 di Bekasi Jawa Barat memutuskan penggabungan Partai Keadilan dengan Partai Keadilan Sejahtera dan dikukuhkan secara yuridis-formal dihadapan notaris pada tanggal 3 Juli 2003. Dengan demikian secara formal PK tidak didaftarkan menjadi kontestan pemilu 2004 dan menjadi bagian PKS.¹⁸

Prinsip-Prinsip Kebijakan PKS

Prinsip kebijakan PKS merupakan jati diri partai dan juga berlaku sebagai landasan dalam setiap pengambilan kebijakan. Prinsip kebijakan tercermin dalam jati dirinya sebagai partai dakwah. Dakwah yang diyakini oleh PKS adalah *da'wah rabbāniyyah 'ālamīyyah*, yaitu dakwah yang membimbing manusia mengenal Tuhannya dan dakwah yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Atas dasar itulah, maka dakwah menjadi dasar setiap kebijakan dan langkah operasionalnya sebagaimana dijabarkan prinsip-prinsipnya sebagai berikut:¹⁹

- a. *asy-Syumūliyyah* (Lengkap dan Integral)
- b. *al-Ishlāh* (Reformatif)
- c. *asy-Syar'īyyah* (Konstitusional)
- d. *al-Wasath* (Moderat)
- e. *al-Istiqāmah* (Komit dan Konsisten)
- f. *an-Nuwūr wa at-Tawāthur* (Tumbuh dan berkembang)
- g. *at-Tadarruj wa at-Tawāzzun* (bertahap, seimbang, dan proporsional)
- h. *al-'Auliyāt wa al-Masblahah* (Skala prioritas dan prioritas kemanfaatan)
- i. *al-Mustaqbaliyyah* (orientasi masa depan)
- j. *al-'Alamiyah* (bagian dari dakwah sedunia)

Rekrutmen Kader, Pengurus, Pejabat Publik

Rekrutmen Kader

PKS dikenal sebagai partai kader yang memiliki pola pengkaderan secara sistemik dan metodik. Terkait dengan rekrutmen anggota PKS membuka peluang secara terbuka bagi masyarakat umum untuk bergabung selagi sejalan dengan visi misi dan tujuan partai. Pasca pemilu 2009 lalu PKS mendeklarasikan dirinya sebagai partai terbuka, ini artinya semua warga negara Indonesia tak terkecuali non-muslim diperbolehkan untuk bergabung menjadi anggota partai. Di antara syarat-syaratnya adalah:

- a. Berusia minimal 17 tahun atau lebih atau sudah menikah.
- b. Tidak memiliki catatan kriminal
- c. Setuju dengan tujuan partai, berlaku juga untuk cabang-cabang partai.
- d. Patuh dan tunduk terhadap ketetapan partai.
- e. Mengucapkan sumpah anggota.

Secara umum, di Yogyakarta, terdapat beberapa tingkatan kader:

- a. Kader Mula: proses pengkaderan berlangsung selama 1 tahun. Sejumlah *progress indicators* dilakukan untuk memantau Kader Mula, misalnya intensitas dalam kegiatan tarbiyah partai politik, perilaku keseharian, kondisi keluarga, intensitas ibadah, kesehatan dan kekuatan fisik, posisi sosial ekonomi di masyarakat serta tingkat kapasitas untuk memberikan infaq kepada PKS sebagai ekspresi kongkret dari *jihād siyāsī*. Kader Mula masih dianggap masa training dan belum diperbolehkan

untuk menduduki jabatan struktural di partai, legislatif ataupun eksekutif. Terkait dengan materi pengkaderan, untuk level mula, materi dapat diperoleh dengan bebas. Sebab, materi tersebut diperjualbelikan secara bebas di took-toko buku.

- b. Kader Muda: proses pengkaderan berlangsung selama 2 tahun. Kader muda mulai memperoleh tanggung jawab yang lebih besar daripada kader mula, misalnya diberi kesempatan untuk terlibat di kepengurusan ranting. Indikator yang digunakan untuk menilai progres dari kader muda tidak jauh berbeda dengan kader mula dan materi pengkaderan juga dapat diperoleh secara bebas dengan membeli di toko-toko buku.
- c. Kader Madya: melalui proses pengkaderan selama 2 tahun. Kader madya biasanya ditempatkan di kepengurusan cabang. Materi pengkaderan di level ini mulai bersifat rahasia, terbatas dan hanya beredar di kalangan internal PKS.
- d. Kader Dewasa: proses pengkaderan dilakukan selama 3 tahun. Materi pengkaderan bersifat rahasia, terbatas dan hanya beredar di kalangan internal PKS. Dalam wilayah manajemen organisasi, kader dewasa mulai ditempatkan untuk mengisi jabatan publik, seperti di legislatif maupun di eksekutif. Di samping itu, kader dewasa juga mulai dibuka ruang untuk mengisi kepengurusan di level wilayah.
- e. Kader Ahli: proses pengkaderan ditempuh selama 3 tahun. Materi pengkaderan jauh lebih berat serta sangat bersifat rahasia, terbatas dan hanya beredar di kalangan internal PKS. Kader ahli biasanya telah ditempatkan di DPP dan Majelis Syuro.
- f. Kader Purna: hampir semua kader purna diakomodasi menjadi anggota Majelis Syuro PKS.²⁰

Proses pendidikan politik PKS diarahkan untuk membentuk pemahaman *jihād siyāsī*, kesadaran *jihād siyāsī* dan partisipasi kongkret dalam *jihad siyasi*. *Jihād siyāsī* dilakukan untuk melakukan transformasi ke dalam 7 tahapan, yaitu:

- a. Tahapan Individu: transformasi individu dilakukan dengan melakukan tarbiyah, sehingga terbentuk individu yang beriman, cerdas, bermanhaj yang benar, sehat dan kuat secara fisik serta mempunyai kemandirian ekonomi.
- b. Tahapan Keluarga: transformasi dilakukan dengan membentuk keluarga *sakīnah, mawaddah wa rahmah* dengan bersendikan

manhaj *jihād siyāsī* yang benar dan dapat mendukung perjuangan PKS sebagai sebuah partai.

- c. Tahapan Masyarakat: meningkatkan *gīrah* politik masyarakat untuk terlibat ke dalam *jihād siyāsī* di bawah manhaj yang benar.
- d. Tahapan perbaikan sistem pemerintahan: dilakukan dengan berusaha mencapai target suara 30%.
- e. Tahapan membebaskan Indonesia dari cengkeraman negara lain: dilakukan dengan mengambil alih aset negara yg selama ini dikuasai asing (Caltec, Freeport). Hal ini dapat dilakukan bilamana PKS bisa memperoleh target suara 70%.
- f. Tahapan menggalang kekuatan bersama negara-negara yang seideologi melawan kekuatan negara barat.
- g. Tahapan penyatuan masyarakat sedunia untuk tunduk pada kekuatan Allah.

Semua anggota partai pada segala level harus mentaati kewajiban-kewajiban di bawah ini:

1. Mengikuti norma-norma dan ajaran-ajaran Islam dalam setiap aktivitas mereka.
2. Mengikuti ajaran syari'ah yang ditafsirkan oleh partai sebagaimana dielaborasikan dalam keputusan melalui Kongres Nasional dan Dewan Pertimbangan.
3. Berpartisipasi dalam program-program dan kegiatan keislaman yang diselenggarakan oleh partai.
4. Melindungi partai dari setiap tuduhan berdasarkan pada kemampuan dan kesempatan mereka.
5. Berusaha untuk menjadi panutan bagi masyarakat dalam menjalankan kebijakan dan cinta tanah air.
6. Tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan partai dalam aktivitas sehari-hari.
7. Melakukan yang terbaik untuk meraih cita-cita dan idealisme partai.
8. Berpartisipasi secara aktif dalam setiap pertemuan partai.
9. Berusaha untuk membangun dan memperkuat hubungan antara partai dengan organisasi lain.
10. Taat kepada pimpinan dan mengikuti kehendak mayoritas umum.
11. Berusaha memperkuat ikatan antara partai dengan masyarakat luas.
12. Menghindari setiap kegiatan yang kontraproduktif terhadap cita-cita partai.

13. Menjalankan mandat secara bertanggung jawab yang diberikan oleh partai.
14. Menjaga dan melindungi properti yang dimiliki partai.
15. Mengikuti maklumat-maklumat dan saran-saran yang melalui partai dengan mempertimbangkan isu-isu publik.
16. Membayar iuran wajib secara rutin.
17. Memberikan zakat dan sedekah kepada partai.
18. Mengumpulkan dana dan kontribusi untuk partai.²¹

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa PKS sebagai partai yang memiliki kebijakan terbuka dalam keanggotaannya tidaklah konsisten dengan kewajiban atau persyaratan yang ditetapkan oleh partai. Hal tersebut dapat disimpulkan dari, pertama, setiap anggota wajib melakukan sumpah sebagai anggota dengan mengucapkan kalimat Syahadat. Setiap calon anggota yang mengucapkan sumpah berarti mengisyaratkan bahwa setidaknya seseorang tersebut adalah seorang muslim. Kedua, kewajiban-kewajiban keanggotaan yang menetapkan peraturan-peraturan berdasarkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan personal anggotanya berarti bahwa mereka memaksa setiap anggotanya menjadi muslim.

Pada tingkat organisasi, PKS memiliki struktur yang unik di mana struktur tersebut mengklaim otoritas agama di atas semua anggota-anggotanya melalui Dewan Syari'ah Partai. Dewan Syari'ah mengeluarkan fatwa yang mengikat bagi setiap anggotanya. Hal ini menyebabkan ketegangan antara PKS dengan organisasi keislaman lainnya yang merasakan bahwa PKS telah melanggar wilayah mereka. Kasus yang paling kontroversi adalah peraturan resmi yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang memperingatkan penyusupan kegiatan-kegiatan para anggota PKS ke dalam organisasi.²²

Banyak anggota-anggota PKS, aktivis, dan para pemimpinnya memiliki orang tua yang aktif di dalam organisasi Muhammadiyah, seperti Hidayat Nurwahid, Anies Matta, Tifatul Sembiring, yang merupakan fungsionaris Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut sangatlah dekat satu sama lain pada tingkatan akar rumput dan kebanyakan dari mereka bahkan memiliki keanggotaan ganda. Permasalahan-permasalahan ini mulai muncul ketika anggota-anggota PKS yang seharusnya menjadi fungsionaris Muhammadiyah atau bekerja di dalam institusi Muhammadiyah lebih senang mengikuti fatwa-fatwa Dewan Syari'ah PKS daripada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah.

Banyak para petinggi Muhammadiyah meyakini bahwa perkembangan tersebut bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi lebih kepada manuver yang sistematis oleh PKS secara bertahap yang masuk ke dalam institusi Muhammadiyah seperti sekolah, universitas, panti asuhan, demi kepentingan politik semata. Salah satu anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan bahwa antara Muhammadiyah dan PKS memiliki perspektif dan agenda yang secara fundamental berbeda pada saat memasuki ranah politik. Muhammadiyah meyakini bahwa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara, sedangkan PKS berjuang dengan undang-undang dan penerapan sistem politik Islam yang terinspirasi oleh Ikhwanul Muslimin Mesir. Hal ini menjadikan Muhammadiyah mengeluarkan surat keputusan untuk mengusir anggota-anggotanya yang mendukung PKS dari organisasi Muhammadiyah.

Senada dengan aktivis NU, termasuk para takmir masjid, melakukan pertemuan bersama untuk bekerja sama dalam melawan penyusupan yang dilakukan oleh aktivis dari luar organisasi mereka yang juga berkaitan dengan PKS. Menyikapi hal ini, PKS kemudian secara resmi mengklarifikasi bahwa mereka tidak pernah memobilisasi kader-kadernya untuk memasuki organisasi lain.

Berdasarkan struktur tingkatannya, PKS dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tingkat. Pertama dan yang paling penting adalah Majelis Syuro sebagai pembuat keputusan tertinggi dalam partai. Akan tetapi, majelis ini memiliki fungsi yang agak berbeda antara periode Partai Keadilan (1999-2003) dan PKS (setelah 2003). Selama masa PK, majelis ini merupakan pimpinan tertinggi kedua setelah Kongres Nasional, akan tetapi pada saat periode PKS, majelis ini menjadi pembuat keputusan. Perkembangan ini menunjukkan pada apa yang disebut sebagai sistem oligarki atau pematangan suatu organisasi²³ di mana demi kepentingan keefektifan organisasional, partai menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada beberapa orang dengan mengorbankan hak dan aspirasi anggota-anggotanya.

Tugas dan kewajiban dari Majelis Syuro ini merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi partai, yaitu:

1. Majelis Syuro menyiapkan dan mengadakan Kongres Nasional.
2. Menyeleksi dan menunjuk pimpinan dan wakilnya, dan sekretaris Majelis Syuro.
3. Memilih pimpinan dan wakilnya dan sekretaris, dan anggota-anggota Dewan Pertimbangan Partai.

4. Memilih pimpinan dan wakilnya, sekretaris dan anggota-anggota Dewan Syari'ah pada tingkat nasional.
5. Memilih pimpinan dan para wakilnya, sekretaris jenderal, bendahara umum, dan personil-personil lainnya pada Pimpinan Pusat Partai.
6. Membentuk tujuan partai, peraturan-peraturan dan rekomendasi pada Kongres Nasional.
7. Memiliki kapasitas untuk mengembangkan anggaran dasar partai.
8. Merencanakan anggaran partai dan mengawasi laporan keuangan.
9. Merencanakan program-program partai dan mengawasi pelaksanaannya.
10. Memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengambil langkah-langkah penting untuk melawan setiap tindakan yang membahayakan citra partai di muka publik.²⁴

Institusi terpenting kedua pada tubuh PKS adalah Majelis Pertimbangan Partai. Jumlah anggota dari MPP ini adalah maksimal sepertiga dari jumlah anggota Majelis Syuro. Anggota-anggota MPP ini dipilih di antara anggota-anggota Majelis Syuro. Tugas-tugas dari MPP ini adalah menjalankan tugas harian dari Majelis Syuro seperti:²⁵

1. Meneliti kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Kongres Nasional dan Majelis Syuro sebagai bagian dari program-program partai.
2. Memperbaiki dan mengawasi penerapan dari kebijakan-kebijakan partai.
3. Bertanggung jawab untuk menanggapi isu-isu umum.
4. Menyiapkan Kongres Nasional dan pertemuan Majelis Syuro.
5. Menyerahkan rekomendasi-rekomendasi untuk program-program partai dan strategi dalam pemilu, dan memeriksa para kandidat partai.
6. Merencanakan dan mendelegasikan kepada organisasi, institusi dan kegiatan-kegiatan lain.
7. Merencanakan petunjuk operasional program-program dan strategi partai.
8. Mengesahkan biaya anggaran yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat kepada Majelis Syuro.
9. Menetapkan personalia kepada Kantor Pusat partai.

10. Bertanggung jawab untuk melindungi dan mengambil langkah-langkah penting untuk melawan setiap tindakan yang membahayakan citra partai.

Institusi ketiga pada pimpinan partai adalah Dewan Syari'ah yang bertugas memberikan interpretasi dan petunjuk pada hukum Islam yang berkaitan dengan program-program partai. Dewan Syari'ah ini bertugas mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkenaan dengan masalah politik dan permasalahan lainnya untuk kepentingan partai dan masyarakat luas, mulai dari masalah politik internasional seperti terorisme dan invasi AS ke Iraq dan Afghanistan, sampai ke masalah pada tingkat nasional seperti pemilu dan konflik antar suku.²⁶

Institusi terakhir pada pimpinan pusat partai adalah badan eksekutif, yakni Dewan Pimpinan Pusat (DPP). DPP ini memiliki tiga jenis tanggung jawab. *Pertama*, fungsi konseptual: i) Merencanakan agenda-agenda rutin partai dan biaya anggaran untuk birokrasi eksekutif pada tingkat nasional dan yang lebih rendah, dan menyerahkannya kepada Majelis Pertimbangan Partai; ii) Membuat proposal untuk kepentingan amandemen-amandemen anggaran dasar partai kepada MPP; iii) Mempersiapkan kebijakan-kebijakan berkenaan dengan birokrasi partai pada tingkat yang lebih rendah. *Kedua*, fungsi struktural yaitu: i) Bertanggung jawab untuk menerima kontribusi-kontribusi legal kepada partai; ii) Menulis laporan pertanggungjawaban rutin yang berkaitan dengan program kerja partai dan menyerahkannya kepada MPP; iii) Mengajukan daftar kandidat partai yang potensial; iv) Menulis laporan kepada Majelis Syuro setiap dua bulan sekali. *Ketiga*, fungsi manajerial, yakni: i) Mengangkat pengurus untuk birokrasi partai; ii) Memimpin, mengarahkan dan mengawasi birokrasi partai pada tingkat yang lebih rendah; iii) menginisiasi dan mengkoordinasikan bantuan lembaga-lembaga partai; iv) Melantik pimpinan partai pada tingkat propinsi; v) Mengarahkan dan mengevaluasi agenda-agenda partai pada tingkat propinsi. Fungsi *keempat* adalah fungsi operasional, yaitu: i) Menjalankan kebijakan partai dan agenda-agenda yang dibuat oleh Majelis Syuro; ii) Mengeluarkan pernyataan-pernyataan partai secara resmi; iii) Merekrut anggota dan mengembangkan SDM partai; iv) Mengkoordinasi wakil-wakil partai yang memegang posisi pada kantor publik.²⁷

Rekrutmen Pengurus Partai

Dalam manifesto partai yang tertuang dalam AD/ART, PKS menggambarkan dirinya sebagai partai kader, tanpa diikuti oleh kalimat penjelas apa sejatinya yang dimaksudkan dengan partai kader dan mengapa pula memilih serta menetapkan partai kader sebagai pilihan komposisi dan fungsi keanggotaan partainya.

Pilihan sebagai partai yang menyandarkan diri pada proses pengkaderan yang kuat didasarkan pada argumen: *Pertama*, berhubungan dengan sumber daya partai. Kaderisasi dijadikan sebagai pintu masuk bagi maksimasi kader dari segi kuantitas dan kualitas. *Kedua*, dari segi komunikasi politik, basis massa yang telah tercerahkan perspektif kaderisasi PKS diletakkan sebagai obyek politik yang dalam waktu tertentu dapat dimanfaatkan untuk mobilisasi massa, terutama merespon isu-isu sosial dan politik yang dianggap aktual. *Ketiga*, dengan memanfaatkan komunikasi politik yang berbasiskan bahasa agama “dakwah dan segala simbol keislaman” menemukan efektivitasnya, selain massa partai yang menurut kadar pengetahuan agama dangkal, sikap dan ekspresi keislaman yang sering ditampilkan bersifat simbolik. *Keempat*, berdasarkan teori kalkulasi politik, PKS sangat berkepentingan untuk memenangkan pada even-even politik, baik kemenangan wacana maupun sosial kalkulasi kuantitatif. Faktor keempat inilah yang memungkinkan beberapa pemilihan kepala daerah yang tersebar di Indonesia, politik PKS semakin solid dan merasa percaya diri untuk menjagokan kadernya.

Berbasiskan keempat faktor di atas, untuk wilayah Yogyakarta, PKS melakukan kaderisasi pada semua level secara maksimal. Kantong-kantong dakwah baik melalui metode usroh ataupun halaqoh-halaqoh kecil di kampus-kampus yang merupakan lahan paling subur untuk terus di pupuk. Tak pelak, kaderisasi PKS berikut tahapan-tahapannya yang dikelola dengan sistem tarbiyah (pendidikan) merupakan hal sentral yang senantiasa dibincangkan oleh para kadernya. Hal ini disebabkan karena unsur tarbiyah yang dijalankan secara rutin oleh semua kader yang bernaung di bawah bendera gerakan tarbiyah dan merupakan wahana untuk merajut intensitas pertemuan yang berisi pengayaan wacana keagamaan, politik, dan ideologisasi pergerakan. Tak pelak, dalam perkembangannya, kaderisasi dalam sistem tarbiyah ini merupakan tahapan yang paling menentukan dan karenanya penting untuk diurai dalam membedah kemantapan organisasi dan orientasi politik PKS.

Rekrutmen Kepala Daerah

Rekrutmen kepala daerah dilakukan secara terpusat melalui otoritas Dewan Syura dan disesuaikan dengan tingkatan status kader serta mengacu pada arahan strategi dari DPP dan DPW. Selain itu juga mengacu pada kajian yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pilkada PKS. Sebagaimana yang kita ketahui persis sebulan lalu Pemerintah Kota Yogyakarta baru menggelar Pemilihan Kepala Daerah. Pada waktu itu ada tiga kandidat; pertama Zuhrif dan Hudaya; kedua Hanafi Rais dan Tri Harjun (Fitri); ketiga Haryadi dan Suyuthi (Hati). Dari ketiga pasangan calon tersebut pasangan calon nomor satulah yang diusung oleh PKS.

Zuhrif sendiri merupakan Sekretaris DPW PKS, akan tetapi dalam pencalonan kepala daerah PKS tidak menutup kemungkinan mengusung orang dari luar PKS. Selain ada juklak yang menagatur, secara normatif PKS mau tidak mau juga harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa masuk sebagai kandidat kepala daerah karena perolehan suaranya kurang dari 15 persen. Secara umum tidak ada syarat khusus bagi calon dari luar PKS karena juklak yang ada hanya memproses dari calon internal. Kalau memang kemudian ada orang dari luar yang diusung oleh PKS atau PKS berkoalisi mau tidak mau harus menemui titik-titik kompromi. Untuk calon dari luar, biasanya pencalonan dilihat kemungkinan pemenangannya dan baru keputusan diberikan pada satu tingkat di atasnya—dalam konteks pilkada Kota Yogyakarta berarti DPW PKS. Selain itu, untuk mengukur popularitas dan elektabilitas calon dibuatlah survei.

Dalam pilkada Kota Yogyakarta kemarin, PKS berkoalisi dengan partai-partai non parlemen di antaranya Hanura, PKDI, Republikan, PKPB. Pada dasarnya pilihan koalisi PKS ini karena partai-partai besar yang lain sudah mencalonkan sendiri. PKS sebagai partai kader merespon aspirasi dari bawah. Pertama, mereka merasa lebih bangga kalau partainya bisa maju sendiri. Kedua, PKS ingin mendobrak kejumudan politik yang ada di Kota Yogyakarta supaya ada dinamika politik daripada kalau pasangan calonnya hanya dua. Ketiga, PKS juga ingin menurunkan tensi ketegangan politik yang dihasilkan dari dua kubu pasangan calon. Kalau ada 3 pasangan calon, ketegangan tidak terjadi di antara dua kutub. Keempat, amanat Musda PKS menekankan harus memiliki target kepala daerah dari kadernya sendiri, minimal calon walikota.²⁸

Penutup

Sejak pertama kali kemunculannya di panggung politik, PKS selalu menarik perhatian publik. PKS tumbuh sebagai organisasi Islam yang digerakkan oleh para aktivis muda Islam yang notabene berasal dari universitas umum. Sebagai partai Islam, PKS memiliki strategi dalam merumuskan kebijakan dan perjuangan politiknya yang bercorak Islam, di antaranya dengan membangun platform memelihara keluarga Islami dan mendirikan masyarakat Muslim.

Dalam membangun kader-kadernya yang militan, PKS tidak sekedar merekrut anggota tetapi juga membinaanya secara berkala. PKS DPW Yogyakarta selalu mengadakan *halaqah* minimal seminggu sekali untuk mendiskusikan persoalan-persoalan agama, sosial, ekonomi, dan politik. Memang dalam perkembangannya mereka memiliki ketegangan yang cukup signifikan dengan Ormas Muhammadiyah saat ini. Hal ini dikarenakan PKS Yogyakarta disinyalir merebut 'pasar' bentukan Muhammadiyah seperti sekolah, rumah sakit, dan majelis agama.

Untuk penempatan jabatan-jabatan strategis tergantung posnya. Kalau untuk kepengurusan partai tidak ada jalan secuilpun untuk orang lain bisa menjadi pengurus partai dan legislatif. Hal ini disebabkan PKS sudah menyatakan diri sebagai partai kader. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk jabatan-jabatan eksekutif, pimpinan kepala daerah, PKS membuka diri seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin mengajukan diri *via* PKS selagi memenuhi kriteria popultartas dan elektabilitas yang telah ditentukan oleh partai.

Catatan akhir:

¹ Kacung Marijan, "Partai Serius Partai Tidak Serius," dalam Gouzali Saydam (ed.), *Dari Balik Suara ke Masa Depan Indonesia: Potret Konflik Politik pasca Pemilu dan Nasib Reformasi*, (Jakarta: Grafindo, 1999), h.120.

² Barbara Geddes, *Politician's Dilema: Building State Capacity in Latin America*, (London: University of California Press, 1994), h. 150.

³ Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok Penekan*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1984) h. 6.

⁴ Maurice Duverger, *Partai Politik*

⁵ Riswandha Imawan dan Ketut Putra Erawan, *Parpol, Pemilu, dan Legislasi*, (Yogyakarta: JIP, 2007).

⁶ Riswandha Imawan dan Ketut Putra Erawan, *Parpol, Pemilu*

⁷ Otto Kriheimer, dalam Ichlasul Amal (ed), *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1996), h. 79.

⁸ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 98.

⁹ Arief Ihsan Rathomy, *PKS & HTI: Genealogi dan Pemikiran Demokrasi*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 2006), h. 56.

¹⁰ Arief Ihsan Rathomy, *PKS & HTI*, h. 57.

¹¹ M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Partai Politik PKS*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h. 34.

¹² Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan*, (Bandung: Teraju, 2003), h. 229.

¹³ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan*, h. 230.

¹⁴ Arief Ihsan Rathomy, *PKS & HTI*, h. 60.

¹⁵ M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Partai Politik PKS*, h. 36.

¹⁶ M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Partai Politik PKS*, h. 38.

¹⁷ Arief Ihsan Rathomy, *PKS & HTI*, h. 65-66.

¹⁸ Arief Ihsan Rathomy, *PKS & HTI*, h. 66.

¹⁹ Arief Ihsan Rathomy, *PKS & HTI*, h. 69-73.

²⁰ Wawancara dengan Fungsionaris PKS Arif Budiono, tgl 4 November 2011.

²¹ Keanggotaan PKS, pasal 12.

²² SK PP No. 149/2006

²³ Richard Katz, "The Internal Life of Parties," dalam Luther, Kurt Richard, dan Ferdinand Mueller-Rommer, (ed.), *Political Parties in the New Europe: Political and Analytical Challenges*, (New York: Oxford UP, 2002), h. 87-115.

²⁴ PKS ART, pasal 7

²⁵ PKS-ART, pasal 8-9

²⁶ PKS-ART, pasal 12

²⁷ PKS-ART, pasal 14-117

²⁸ Wawancara dengan Ardianto, Ketua Fraksi PKS Kota Yogyakarta, (10-10-2011).

DAFTAR PUSTAKA

Damanik, Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan*, Bandung: Teraju, 2003

Duverger, Maurice, *Partai Politik dan Kelompok Penekan*, Yogyakarta: Bina Aksara, 1984

Geddes, Barbara, *Politician's dilemma: Building State Capacity in Latin America*, University of California Press, 1994

Imawan, Riswandha dan Ketut Putra Erawan, *Parpol, Pemilu, dan Legislasi*, Yogyakarta: JIP, 2007

Katz, Richard, "The Internal Life of Parties," dalam Luther, Kurt Richard dan Ferdinand Mueller-Rommer (ed.), *Political Parties in*

the New Europe: Political and Analytical Challenges, New York: Oxford UP, 2002

Kriheimer, Otto, dalam Ichlasul Amal (ed), *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996

Marijan, Kacung, "Partai Serius Partai Tidak Serius," dalam Gouzali Saydam (ed.), *Dari Balik Suara ke Masa Depan Indonesia: Potret Konflik Politik pasca Pemilu dan Nasib Reformasi*, Jakarta: PT. Grafindo, 1999

Muhtadi, Asep Saeful, *Komunikasi Politik Indonesia Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008

Rahmat, M. Imdadun, *Ideologi Partai Politik PKS*, Yogyakarta: LKiS 2008

Rathomy, Arief Ihsan, *PKS&HTI: Genealogi dan Pemikiran Demokrasi*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 2006

Wawancara dengan Arif Budiono (Kabid. Kebijakan Publik DPW PKS DIY), 4 – 11 -2011

Wawancara dengan Ardianto (Ketua Fraksi PKS DPC Kota Yogyakarta), 10-10-2011

